

**EFEKTIFITAS TUGAS BIDANG PEMERINTAHAN
PADA KANTOR KECAMATAN TAMPAN
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Guna Untuk Memenuhi Persyaratan Mendapatkan Gelar
Sarjana Pendidikan (S1) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**



MILIK
PERPUSTAKAAN UIN AL - JAMI'AH SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NO. <u>2010 331 AN</u>
TGL. <u>12 NOV 2010</u>
PARAF. <u>[Signature]</u>

OLEH :

HARDIAN PASARELLA
NIM : 10675005106

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2010**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : HARDIAN PASARELLA
NIM : 10675005106
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL : EFEKTIFITAS TUGAS BIDANG PEMERINTAHAN
PADA KANTOR KECAMATAN TAMPAN KOTA
PEKANBARU

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING I



NOPRI AHADI, SE, MM
NIP. 19701108 200801 1 008

PEMBIMBING II



MASHURI, MA
NIP. 130 707 011

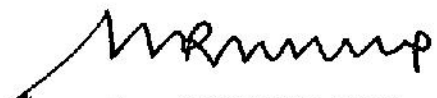
MENGETAHUI :

DEKAN FAKULTAS EKONOMI
DAN ILMU SOSIAL



ZWAR HARAHAHAP, M.Si
NIP. 19560202 198403 1 002

KETUA JURUSAN
ADMINISTRASI NEGARA



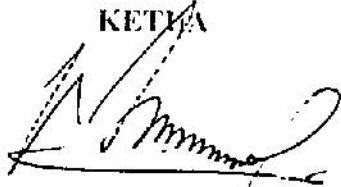
Drs. ALMASRI, M.Si
NIP. 19670801 200501 1 007

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : HARDIAN PASARELLA
NIM : 10675005106
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL : EFEKTIVITAS TUGAS BIDANG PEMERINTAHAN PADA
KANTOR KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU


PANITIA PENGUJI :

KETUA



Drs. H. ZAMHARIL YAHYA, MM
NIP. 19520615 198103 1 003

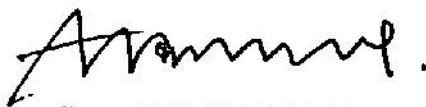
SEKRETARIS



MUSTIQOWATI UMMUL F, M.Si
NIP. 19791127 200801 2 010

ANGGOTA :

PENGUJI I



Drs. ALMASRI, M.Si
NIP. 19670801 200501 1 007

PENGUJI II



RUSDI, S.Sos, MA
NIP. 19720906 200710 1 002

EFEKTIFITAS TUGAS BIDANG PEMERINTAHAN PADA KANTOR KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

OLEH :

HARDIAN PASARELLA

Kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggara birokrasi pemerintah yang berada setingkat lebih tinggi dari desa atau kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas serta hambatan tugas bidang pemerintahan pada kantor kecamatan Tampuan kota Pekanbaru. Lokasi penelitian adalah di kantor Kecamatan Tampuan kota Pekanbaru. Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Tampuan Kota Pekanbaru, adapun pengambilan sampel dilakukan dengan cara menggunakan rumus slovin dan ditetapkan sampelnya sebanyak 100 orang dari masyarakat Kecamatan Tampuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi yaitu pengamatan langsung di lokasi penelitian, dan kuisioner yaitu dengan menyediakan daftar pertanyaan yang diajukan pada responden. Analisa data dalam melakukan penelitian menggunakan analisa deskriptif.

Dari hasil penelitian diperoleh tanggapan responden mengenai efektifitas tugas bidang pemerintahan pada kantor Kecamatan Tampuan kota Pekanbaru dengan indikator kuantitas kerja, waktu yang digunakan dan jabatan yang dipegang rata-rata menyatakan cukup baik yaitu sebanyak 43% dari 100 responden. Penulis menyarankan kepada aparatur pemerintahan agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sebaiknya diberikan pelatihan, pembinaan perilaku dan sumber daya manusianya supaya terciptanya aparatur pemerintahan yang berkualitas.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat dan karuniaNYA, serta shalawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian munaqasah serta guna memperoleh gelar sarjana sosial pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Adapun judul dari skripsi ini adalah : **“Efektifitas Tugas Bidang Pemerintahan Pada Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”**.

Untuk menyelesaikan skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan, saran serta bimbingan baik moral maupun materil selama penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. Azwar Harahap, MS,i selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
2. Bapak Drs. Almasri, MS,i selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
3. Bapak DR. Nopri Ahadi, SE, MM selaku dosen pembimbing I yang telah membantu dan memberikan petunjuk kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

4. Bapak Mashuri, MA selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan sumbangan pikiran dan saran serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen selaku staff dan pengajar beserta karyawan/i Tata Usaha pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu, Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membimbing dan mengajarkan ilmu selama berkuliah.
6. Bapak Camat beserta staff pegawai pada kantor camat tampan kota Pekanbaru yang telah membantu penulis memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teristimewa Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu mengiringi dengan untaian do'a dan nasehat serta tak hentinya memberikan dorongan moril, materil dan motivasi yang tak terhingga bagi penulis.
8. Terimakasih untuk teman-teman angkatan 2006 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan rahmat yang berlipat ganda atas jasa-jasa mereka yang telah membantu penulis selama ini.

Pekanbaru, Juli 2010

HARDIAN PASARELLA
NIM. 10675005106

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
	III.A. Lokasi Penelitian.....	28
	III.B. Populasi dan Sampel.....	28
	III.C. Jenis dan Sumber Data	28
	III.D. Teknik Pengumpulan Data	29
	III.E. Analisa Data.....	29
BAB IV	GAMBARAN UMUM KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU	
	IV.A. Keadaan Geografis Wilayah.....	30
	IV.B. Struktur Organisasi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru....	34
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	V.A. Gambaran Umum Responden	39
	V.B. Efektivitas Tugas Bidang Pemerintahan Pada Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	42
	V.C. Hambatan-hambatan Tugas Bidang Pemerintahan Pada Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	60
BAB VI	PENUTUP	
	VI.A. Kesimpulan	62
	VI.B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
I.1 : Jumlah pegawai pada kantor Kecamatan Tampan kota Pekanbaru	5
I.2 : Sarana dan prasarana pada kantor camat Tampan	7
IV.1 : Data monografi Kecamatan Tampan	30
IV.2 : Jumlah penduduk per kelurahan berdasarkan jenis kelamin kecamatan Tampan	31
IV.3 : Jumlah penduduk menurut agama di kecamatan Tampan	32
IV.4 : Jumlah sarana pendidikan di kecamatan Tampan.....	32
IV.5 : Sarana kesehatan di kecamatan Tampan.....	33
V.1 : Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin.....	39
V.2 : Jumlah responden berdasarkan tingkat usia.....	40
V.3 : Jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan	40
V.4 : Jumlah responden berdasarkan jenis pekerjaan	41
V.5 : Pelaksanaan tugas bidang pemerintahan pada kantor kecamatan telah Memenuhi standar dan kualitas yang telah ditetapkan	44
V.6 : Tugas bidang pemerintahan pada kantor Kecamatan Tampan telah sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki pegawai	44
V.7 : Kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugas bidang pemerintahan pada Kantor Kecamatan Tampan	45
V.8 : Pelaksanaan tugas bidang pemerintahan yang dilaksanakan telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan.....	46

V.9 : Sumber daya yang dimiliki oleh pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang pemerintahan pada kantor Kecamatan Tampan	47
V.10 : Penyelesaian tugas bidang pemerintahan pada kantor kecamatan Tampan tepat pada waktunya.....	48
V.11 : Aktivitas pegawai dalam bekerja telah sesuai dengan pelaksanaan waktu jam kerja yang telah ditentukan sebelumnya	49
V.12 : Para pegawai pemerintahan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin dalam bekerja.....	50
V.13 : Pegawai pemerintahan mematuhi terhadap waktu masuk jam kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan.....	51
V.14 : Pegawai pemerintahan pada kantor Kecamatan Tampan selalu berada ditempat pada saat jam kerja.....	51
V.15 : Jabatan yang dipegang yang menjadi wewenang dan tugas masing-masing bagian sudah terlaksana dengan semestinya	53
V.16 : Pegawai telah mempertanggungjawabkan secara penuh terhadap jabatan yang dibebankan oleh pegawai yang bersangkutan	54
V.17 : Kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada masing-masing pegawai.....	55
V.18 : Pegawai pemerintahan sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas yang diberikan	56
V.19 : Relisasi tugas yang diamanahkan kepada para pegawai pemerintahan pada kantor kecamatan Tampan.....	56
V.20 : Rekapitulasi tanggapan responden tentang efektivitas tugas bidang pemerintahan pada kantor kecamatan Tampan kota Pekanbaru	57



BAB I

PENDAHULUAN

I.A. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, berdaulat, tertib dan damai.

Tujuan pembangunan nasional tersebut diatas hanya dapat dicapai melalui pembangunan yang direncanakan dengan baik dan dilaksanakan secara bertahap, terarah, dengan menggerakkan segenap potensi yang ada melalui pembangunan organisasi yang merupakan suatu faktor yang sangat menunjang kelancaran dari setiap aspek yang akan dibangun.

Organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab. Organisasi mempunyai karakteristik tertentu yaitu mempunyai stuktur, tujuan, saling berhubungan satu bagian dengan bagian lain dan tergantung kepada komunikasi manusia untuk mengkoordinasikan aktivitas dalam organisasi tersebut. Sifat tergantung antara satu bagian dengan bagian lain menandakan bahwa organisasi merupakan suatu sistem (Arni Muhammad, 2005: 23).

Setiap organisasi memerlukan koordinasi supaya masing-masing bagian dari organisasi bekerja menurut semestinya dan tidak mengganggu bagian yang lainnya. Tanpa koordinasi sulitlah organisasi itu berfungsi dengan baik. Kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggara birokrasi pemerintah yang berada setingkat lebih tinggi dari desa atau kelurahan.

Adapun sebutan untuk tiap-tiap wilayah di dalam pasal 24 ayat (2) undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintahan di daerah disebutkan bahwa:

- a) Provinsi disebut Gubernur
- b) Kabupaten disebut Bupati
- c) Kota disebut Walikota
- d) Sedangkan untuk Kecamatan adalah Camat sebagai perangkat daerah

Berdasarkan pasal diatas terlihat beberapa tingkatan kepala wilayah. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini penulis membatasi kepada kepala wilayah kecamatan yang disebut camat sebagai perangkat daerah yang mengepalai kepala wilayah tersebut, walaupun demikian camat adalah salah satu mata rantai dari jalur dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Bayu Suryaningrat yang mengatakan bahwa camat merupakan salah satu mata rantai dari jalur dekonsentrasi, ia adalah kepala wilayah. Oleh karena itu, camat pada dasarnya melaksanakan urusan pemerintahan pusat yang disebut juga urusan umum yang

terdiri dari pelayanan, administrasi dan penyelenggara birokrasi (Bayu Suryaningrat 1996: 53).

Dalam penyelenggaraan birokrasi, Kecamatan membutuhkan tenaga kerja atau pegawai yang berkualitas dan terampil karena efektif tidaknya suatu tugas yang harus dibebankan sebagai pemimpin organisasi dituntut untuk mampu melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya.

Dari penjelasan tersebut, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan adalah Keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dan berbagai unit organisasi pemerintahan dibawah Departemen dan lembaga-lembaga Non Departemen, di pusat maupun di daerah, seperti: di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa maupun Kelurahan (Priyo Budi Santoso, 1996:21).

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan desa serta penugasan dari provinsi atau Kabupaten kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Dari definisi pemerintahan diatas jelaslah bahwa pelaksanaan tugas pemerintah secara organisatoris harus dilaksanakan sedemikian rupa secara utuh.

Tugas dan wewenang kepala wilayah atau camat yang terdapat dalam pasal 126 Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 Ayat 3 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan,
- f) Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan,
- g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

Dalam peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 7 tahun 2008 tentang tugas pokok pemerintahan kecamatan, dijelaskan bahwa kecamatan mempunyai tugas pokok yaitu:

1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah,
2. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,

- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan.
 - f. membina penyelenggaraan kelurahan.
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan Kelurahan.
3. Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kecamatan Tampan adalah merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kota Pekanbaru yang mempunyai luas wilayah 54.714 KM2, jumlah penduduknya 114.700 jiwa. Jumlah pegawai pada Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai pada Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

No.	Jabatan	Jumlah
1	Camat	1
2	Sekretaris Camat	1

3	Seksi Pemerintahan	1
4	Seksi Ketentraman dan ketertiban	1
5	Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan	1
6	Seksi Kesejahteraan Sosial	1
7	Seksi Pelayanan Umum	1
8	Kasub Program	1
9	Kasub Kepegum dan Perlengkapan	1
10	Kasub Keuangan	1
11	Pegawai	10
	Jumlah	20

Sumber: Kantor Kecamatan Tampan, 2010

Dari tabel 1.1 diatas dapat diketahui jumlah pegawai pada Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru cukup memadai, namun dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan belum maksimal dalam pelaksanaannya. Dari 20 orang pegawai Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tersebut, tiga orang yang berpendidikan Sarjana Strata 2, empat orang strata 1 selebihnya tamatan SMA atau sederajat.

Kondisi yang seringkali dialami oleh masyarakat dalam urusannya dengan lembaga pemerintahan pada Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yaitu dalam urusan pembuatan dokumen dan surat-surat lainnya selalu memerlukan waktu yang agak lama.

Tabel 1.2. Sarana dan Prasarana Pada Kantor Camat Tampan

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Aula/Ruang Pertemuan	1
2.	Meja dan Kursi Kayu	20
3.	Mesin Tik	2
4.	Komputer	5
5.	Lemari Kayu	8
6.	Kursi Tamu	3

Sumber: Kantor Kecamatan Tampan, 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pegawai pada Kantor Camat Tampan cukup memadai. Perangkat komputer dan prasarana lainnya tersedia untuk mendukung pelaksanaan tugas pegawai pada Kantor Camat Tampan.

Dari hal-hal tersebut dapat dilihat gejala-gejala yang ditemui di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yaitu masih adanya tugas-tugas bidang pemerintahan yang tidak selesai tepat pada waktunya sehingga dalam pelaksanaan tugas bidang pemerintahan belum maksimal terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bertitik tolak dari gejala-gejala yang ada maka penulis melakukan penelitian dengan judul **"Efektivitas Tugas Bidang Pemerintahan Pada Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru"**.

B. Perumusan Masalah

Pembentukan wilayah Kecamatan adalah ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan asumsi bahwa : “Wilayah kecamatan dapat memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat dan tercapainya efektivitas pelaksanaan tugas bidang pemerintahan pada Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru .

Peranan pemerintah Kecamatan benar-benar merupakan suatu faktor yang sangat menentukan dalam melaksanakan tugas yang telah dibebankan sebelumnya, dimana berhasil tidaknya efektivitas pelaksanaan tugas bidang pemerintahan sangat tergantung kepada kemampuan aparatnya dalam menggerakkan aktifitasnya.

Namun dari pengamatan di lokasi penelitian dalam pelaksanaan tugas bidang pemerintahan pada kantor Kecamatan Tampan diketahui dari gejala-gejala yang ditemui di lokasi penelitian yakni masih adanya tugas-tugas bidang pemerintahan yang tidak selesai tepat pada waktunya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis mengemukakan permasalahan pokok sebagai berikut **“Bagaimana Efektivitas Tugas Bidang Pemerintahan Pada Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”**.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas tugas bidang pemerintahan pada Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas bidang pemerintahan pada Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

D. Kegunaan penelitian

Disamping tujuan diatas, hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat:

1. Sebagai bahan informasi bagi aparat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan tugas bidang pemerintahan untuk masa yang akan datang.
2. Menambah pengetahuan penulis tentang masalah yang diteliti serta bagi pihak lain yang berminat mengetahui, maupun bagi penelitian untuk persoalan yang sama.

E. Sistematika Penulisan

Secara garis besar pembahasan dalam skripsi ini dibagi atas enam pokok bahasan bab dan masing-masing dibagi dalam beberapa sub-bab, seperti berikut ini:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Telaah Pustaka

Bab ini berisikan tentang kerangka teori mengenai pengertian efektifitas, pemerintahan, pelaksanaan tugas, kepemimpinan, hipotesa dan konsep operasional.

Bab III : Metodologi Penelitian

Bab ini berisikan tentang lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisa data.

Bab IV : Gambaran Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Bab ini berisikan keadaan geografis wilayah, keadaan penduduk, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan struktur organisasi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Bab V : Hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektifitas Tugas Bidang Pemerintahan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Dalam bab ini akan dibahas hasil penelitian yang terdiri dari masalah efektivitas tugas bidang pemerintahan serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas bidang pemerintahan pada Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Bab VI : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang membangun bagi objek penelitian.



BAB II

TELAAH PUSTAKA

II.A. Kerangka Teori

I. Efektifitas

Menurut Adam Indrawijaya (2000: 259), efektivitas adalah merupakan suatu program pengembangan manajemen yang pada dasarnya dengan membandingkan tujuan dengan hasil yang dicapai.

Efektifitas merupakan sejauh mana sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia untuk memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota-anggotanya.

Menurut I Nyoman Sumaryadi (2005: 105) Efektifitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Pada dasarnya efektifitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi yang ditetapkan. Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauhmana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.

Efektifitas merupakan suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seorang melakukan sesuatu dengan maksud tertentu dengan tujuan tertentu yang memang kehendaknya maka perbuatan orang itu dikatakan efektif jika menimbulkan efek atau mencapai tujuan sebagaimana yang dikehendakinya.

Menurut Richard M. Steer (1985: 205) mengemukakan ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi yaitu:

- a. Karakteristik organisasi terdiri dari struktur organisasi dan teknologi struktur adalah cara organisasi menyusun orang-orang untuk menciptakan sebuah organisasi.
- b. Karakteristik lingkungan mencapai dua aspek yang saling berhubungan yaitu lingkungan ekstern dan lingkungan intern. Lingkungan ekstern yaitu semua lingkungan kekuatan yang timbul diluar batasan-batasan organisasi. Lingkungan intern pada umumnya dikenal sebagai iklim organisasi yang meliputi bermacam-macam atribut lingkungan kerja.
- c. Karakteristik lingkungan dalam bekerja memiliki pandangan tujuan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda, individu ini memiliki pengaruh langsung terhadap rasa keterkaitan pada organisasi dan prestasi kerja. Tanpa keterkaitan dan prestasi efektivitas akan mustahil tercapai.
- d. Kebijakan dan praktek manajemen dibutuhkan suatu organisasi untuk mewujudkan suatu keberhasilan melalui perencanaan, koordinasi, sehingga dapat memperlancar kegiatan yang dituju kearah sasaran.

Selanjutnya menurut Moch As'ad (1999: 25), indikator dari efektivitas pelaksanaan kerja adalah:

1. Kuantitas kerja pegawai merupakan jumlah atau banyaknya pegawai yang bekerja dan kejelasan tugas masing-masing bagian, dimana jumlah satuan pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh setiap karyawan, baik secara mandiri maupun kelompok untuk mencapai target yang ditetapkan.

Adapun kriteria yang digunakan untuk indikator ini adalah mencapai target yang telah ditetapkan, memenuhi standar dan kualitas yang telah ditetapkan, dan terjadi pemanfaatan sumberdaya secara baik dan optimal.

Produktifitas merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan organisasi yang sehat dan kuat. Bila para karyawan mampu bekerja untuk kuantitas yang maksimal dan kualitas yang prima, maka organisasi akan menjadi semakin efektif dalam operasionalnya.

Perilaku kerja yang mampu mendorong produktifitas adalah perilaku kerja yang cerdas untuk berkolaborasi, berkomunikasi, bersinergi, berkoordinasi, dan fokus pada prestasi. Berkolaborasi artinya selalu siap bekerja sama dengan siapa pun tanpa memiliki perasaan suka atau tidak suka terhadap pihak-pihak terkait.

Perilaku kerja di atas tersebut haruslah menjadi karakter kerja yang membatin dalam diri. Sebab, tanpa kerja sama yang baik, tanpa saling pengertian, dan tanpa saling membantu, maka setiap upaya untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas kerja terbaik akan mengalami kegagalan.

Kuantitas kerja berarti karyawan harus berupaya dengan sekuat tenaga untuk mencapai hasil kerja yang sesuai dengan target. Artinya, karyawan harus selalu menyiapkan kondisi tubuh yang kuat dan sehat, kondisi perasaan dan emosi yang penuh semangat, kondisi pikiran yang jernih, tenang, dan kreatif.

Keberhasilan mengoptimalkan kuantitas kerja sangat tergantung kepada niat dan kemauan karyawan untuk berprestasi. Bila karyawan memiliki motivasi yang kuat untuk menjadikan diri sendiri sebagai pribadi yang produktif, maka mereka pasti memfokuskan diri untuk kuantitas yang prima.

2. Waktu yang digunakan merupakan lamanya suatu tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai, maksudnya waktu yang dipakai oleh pegawai dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya dalam mencapai target yang telah ditetapkan oleh organisasi. Adapun kriteria yang dipakai untuk indikator ini adalah ketaatan terhadap waktu masuk kerja, mentaati waktu pelaksanaan kerja dan kemampuan menyelesaikan tugas sesuai waktu yang telah ditetapkan.
3. Jabatan yang dipegang yaitu wewenang dan tugas masing-masing bagian. Jabatan merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang karyawan dalam rangka susunan satuan organisasi yang dibebankan oleh seorang pejabat yang bersangkutan kepada seseorang baik untuk waktu yang penuh maupun sebagian.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa konsep efektivitas senantiasa berorientasi kepada keluaran (output) dan konsep efisien berorientasi pada masukan (input). Konsep efektivitas cenderung digunakan pada organisasi yang sifatnya publik atau kepentingan masyarakat.

Sedangkan menurut Sp. Siagian (1988: 101) efektivitas adalah “merupakan pekerjaan yang tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan”.

Dari definisi efektivitas diatas dapat dijelaskan bahwa efektivitas adalah merupakan suatu pengukuran terhadap suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi guna tercapai tujuan atau untuk mengukur berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan itu dilakukan.

2. Pemerintahan

Kata bahasa Inggris *govern* (memerintah) berasal dari kata latin *gubernare* atau *gerik kybernan*, artinya mengemudikan (sebuah kapal). Jadi memerintah disini berarti mengemudikan. Kata bendanya adalah *governance* (latin *gubernatia*), menunjukan metode atau sistem pengemudian atau manajemen organisasi. Kata-kata *govern* digunakan dilapangan politik, kata bendanya menjadi *government*. Menurut kamus istilah *government* dapat diartikan pemerintah dan dapat juga diartikan pemerintahan.

Beberapa konsep tentang pemerintahan yaitu :

1. Badan publik, yaitu semua badan yang bertanggung jawab dalam sebagian atau seluruh rute providing suatu jasa atau layanan melalui otorisasi atau privatisasi.
2. Pemerintahan dalam arti terluas adalah semua lembaga negara seperti diatur dalam UUD (konstitusi) suatu negara.
3. Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang oleh konstitusi negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini terdapat misalnya di Indonesia dibawah UUD 1945: kekuasaan pemerintah meliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Bahkan kepada presiden dilimpahkan.

4. Pemerintahan dalam arti sempit yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja.
5. Pemerintah dalam arti tersempit yaitu lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi. Birokrasi adalah aparat pemerintah yang diangkat atau ditunjuk dan bukan yang dipilih atau terpilih melalui pemilihan oleh lembaga perwakilan.
6. Pemerintah dalam arti pelayan, diambil dari konsep *civil servant*. Disini pemerintah dianggap sebagai sebuah warung (toko) dan pemerintah adalah pelayan yang melayani pelanggan (pembeli).
7. Pemerintah dalam konsep pemerintah pusat yaitu pengguna kekuasaan negara pada tingkat pusat (tertinggi), pada umumnya dihadapkan pada konsep pemerintahan daerah
8. Pemerintahan dalam konsep pemerintah daerah. Berbeda dengan pemerintah pusat yang dianggap mewakili daerah, pemerintah daerah dianggap mewakili masyarakat, karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.
9. Pemerintah dalam konsep pemerintah wilayah. Pemerintahan dalam arti ini dikenal dalam negara yang menggunakan asas dekonsentrasi dan desentralisasi.
10. Pemerintah dalam konsep pemerintah dalam negeri. Konsep ini berasal dari tradisi pemerintahan belanda.
11. Pemerintah dalam konteks ilmu pemerintahan adalah semua lembaga yang dianggap mampu (normatif atau secara empirik memproses jasa publik

dan layanan civil (Taliziduhu Ndraha, 2003 : 69-75).

Menurut Inu Kencana (2003: 133) pemerintahan secara etimologi berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut:

1. Mendapat awalan “pe” menjadi kata “perintah” berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara.
2. Mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Didalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut.

1. Ada dua pihak, yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat.
2. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya.
3. Pihak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah (dalam bahasa arab dikenal dengan “sami’na wa’ta’na).
4. Antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik baik secara vertikal maupun horizontal.

Menurut Bayu Suryaningrat (200: 21) pengertian dari pemerintahan jika ditinjau dari sudut bahasanya terdapat kata “Perintah” atau “Pemerintahan” yang ternyata kedua kata tersebut berasal dari kata “ Perintah” yang berarti suatu yang harus dilakukan. Didalam kata tersebut beberapa pengertian atau unsur yang menjadi ciri khas dari kata “Perintah” sebagai berikut:

1. Adanya keharusan menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan.
2. Adanya dua pihak yang memberikan dan menerima perintah.
3. Adanya hubungan fungsional antara yang memberikan perintah dengan yang menerima perintah.
4. Adanya kewenangan atau kekuasaan untuk memberikan perintah.

Dari pengertian pemerintah tersebut, dapat dirumuskan bahwa pemerintah adalah kekuasaan untuk memerintah suatu negara atau daerah, sedangkan pemerintahan adalah urusan atau perbuatan untuk memerintah suatu negara atau daerah.

3. Pelaksanaan Tugas

Menurut John Soeprihanto (2002: 99) peningkatan kelancaran tugas didalam suatu organisasi secara tepat dan baik dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

- a. Pembagian tugas
- b. Kemampuan bekerja sama
- c. Menyelesaikan tugas tepat pada waktunya
- d. Pemberian hasil laporan kerja yang tepat

Dengan adanya indikator untuk menilai kelancaran tugas didalam suatu organisasi secara tepat dan baik sehingga dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan tugas yang merupakan tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian.

Selanjutnya menurut FX. Soejadi (2000: 13) pelaksanaan tugas yang baik adalah :

1. Menghindari terjadinya pemborosan di dalam pendayagunaan faktor tenaga kerja, biaya, volume kerja, material, waktu, tahap pekerjaan dan sebagainya.
2. Menghindari kemacetan-kemacetan dan kesimpangsiuran, sehingga terciptanya efektivitas tugas dalam proses tercapainya tujuan.
3. Menjamin adanya pembagian kerja, waktu, dan koordinasi setepat-tepatnya, sehingga kesederhanaan pekerjaan dapat dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan yang baik bertujuan untuk menghindari hal-hal yang negatif seperti pemborosan di dalam pendayagunaan faktor, kemacetan-kemacetan dan kesimpangsiuran sehingga menjamin adanya pembagian kerja, waktu, dan koordinasi setepat-tepatnya, sehingga kesederhanaan pekerjaan dapat dilaksanakan.

Pelaksanaan tugas menurut SP. Siagian (200:126) adalah suatu kegiatan yang diarahkan pada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada atau mengaturnya.

Sedangkan menurut Gilmer yang disadur As'ad (1996: 13) menjelaskan tentang pelaksanaan tugas yakni sebagai suatu proses fisik maupun mental dari manusia dalam mencapai tujuan.

Pemanfaatan potensi unsur pegawai dalam organisasi terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan merupakan aktivitas yang diarahkan pada keberhasilan dengan melakukan aktivitas fisik maupun mental seseorang.

Menurut As'ad (1999: 56) bahwa ukuran pelaksanaan tugas atau kerja seseorang dapat dilihat dalam bentuk waktu yang dimanfaatkan dari hasil pelaksanaan kerjanya dalam standar yang ditetapkan oleh organisasi.

Berdasarkan ketentuan ukuran pelaksanaan tugas dilihat dari waktu yang dimanfaatkan serta hasil kerja pegawai merupakan dasar bagi ketentuan untuk mengetahui suatu pelaksanaan tugas dari seseorang dalam suatu organisasi.

Dari pengertian diatas maka perlu adanya disiplin pegawai dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sebagaimana berdasarkan pendapat Martoyo (1996: 141) bahwa disiplin berasal dari bahasa latin "*discipline*" yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Jelas sekali bahwa arah dan tujuan disiplin pada dasarnya adalah keharmonisan dan kewajaran, kehidupan kelompok atau organisasi, baik organisasi formal maupun nonformal.

4. Kepemimpinan

Menurut Susilo Maryoto (1997: 158) kepemimpinan adalah keseluruhan aktivitas dalam rangka mempengaruhi orang-orang agar mau bekerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

Kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang berarti bimbing atau tuntun. Kata kerjanya adalah memimpin yang artinya membimbing atau menuntun dan kata bendanya adalah pemimpin yaitu orang yang membimbing atau menuntun.

Menurut Kartini Kartono (2000: 5) bahwa kepemimpinan adalah masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dan dipimpin. Kepemimpinan tersebut

muncul dan berkembang sebagai dari interaksi otomatis diantara pemimpin dan individu-individu yang dipimpin (ada relasi interpersonal).

Kepemimpinan ini bisa berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang lain guna melakukan sesuatu, demi mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya Schneider, Donaghy dan Newman.

Onong Uchjana Effendi (2003: 1) menegaskan bahwa kepemimpinan adalah mengacu kepada perilaku yang ditunjukkan seseorang atau lebih individu dalam kelompok mencapai tujuannya.

Setiap organisasi berusaha agar tujuannya tercapai, salah satu agar tujuan tersebut tercapai adalah dengan jalan meningkatkan motivasi kerja, pada dasarnya seseorang mempunyai motivasi untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya melalui proses kerja atau aktivitas yang dilakukannya.

Berdasarkan beberapa batasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa nada dasarnya kepemimpinan itu adalah suatu kemampuan atau kegiatan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan, dengan kata lain kepemimpinan adalah perpaduan dari faktor pemimpin, pengikut dan situasi.

Menurut Arifin Abdul Rahman (2001: 26) bahwa orang lain itu mau dipengaruhi dan digerakkan disebabkan karena :

1. Adanya dorongan untuk mengikuti pimpinan sehingga adanya kemauan dari orang-orang untuk mengikuti pimpinan.
2. Adanya sifat khusus dari pimpinan ialah sifat-sifat kepemimpinan yang

mempengaruhi jiwa orang-orang sehingga kagum dan tertarik pada pimpinan itu.

3. Adanya kemampuan pada pimpinan untuk menggunakan teknik kepemimpinan.

Pada umumnya antara pimpinan dengan yang dipimpin mempunyai latar belakang dan lingkungan hidup yang berbeda, perbedaan itu tentunya mempunyai konsekuensi pula terhadap kebutuhannya sehingga yang dipimpin mau melibatkan diri dalam proses kerja yang mereka laksanakan. Yang dipimpin umumnya mempunyai motivasi untuk mendapatkan sesuai melalui proses kerja yang mereka laksanakan dan kelompok ini umumnya mempunyai motivasi untuk mendapatkan sesuatu melalui proses kerja atau aktivitas yang dilakukannya.

Motivasi yang diberikan kepada pegawai khususnya merupakan dorongan yang sangat berpengaruh kepada peningkatan kemajuan yang akan dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Motivasi yang diberikan atasan kepada bawahan hendaklah yang sesuai dengan peningkatan karir, karena dorongan yang baik dan benar akan membuat rasa puas bagi bawahan untuk lebih giat bekerja. Dengan adanya perhatian yang diberikan pimpinan kepada bawahan sudah ada nilai tersendiri bagi bawahan bahwa mereka sudah lebih diperhatikan baik dorongan untuk lebih rajin bekerja maupun dorongan untuk loyal kepada organisasi.

Jika sesuatu yang diinginkan itu terpenuhi akan menimbulkan rasa senang dan puas dan sebaliknya apabila keinginan tersebut tidak dapat diwujudkan akan mengakibatkan kekecewaan baik pada dirinya sendiri maupun pada organisasi dan dapat menurunkan loyalitas dan rendahnya kedisiplinan.

Dari pernyataan diatas jelaslah dikatakan bahwa untuk berhasilnya di dalam menjalankan kepemimpinan, maka diperlukan syarat-syarat yaitu :

1. Sifat-sifat tertentu yang harus dimiliki
2. Kemampuan pemimpin

Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, berarti bahwa seorang pemimpin harus dapat memotivasi dan memberikan keyakinan kepada yang dipimpinnya, yang dipimpin harus merasakan kemanfaatan dari kepemimpinan akan efektif, dan yang dipimpin dapat menerimanya dengan taat dan ikhlas. Menurut Ginandjar Kartasasmita (2000: 41) seorang pemimpin harus memiliki tiga sifat, yaitu:

Pertama: Ia harus memiliki idealisme, artinya jelas kemana atau ke arah mana ia ingin membawa yang dipimpinnya.

Kedua: Ia harus memiliki pengetahuan, untuk dapat secara efektif membawa Yang dipimpin kearah tujuan yang “diidealkannya”. Ia harus mengetahui cara memimpin dan menguasai bidang atau tugas dari kelompok yang dipimpinnya, bukan hanya mengerti teknik kepemimpinan, tetapi juga menguasai bidang yang menjadi tanggung jawabnya.

Ketiga: seorang pemimpin harus menjadi teladan dan sumber inspirasi. Oleh karena itu, seorang pemimpin diharapkan manusia yang beriman dan bertaqwa, karena berdasarkan iman dan takwa, pelaksanaan dari rencana kerja dapat diselenggarakan, dengan baik.

Selain sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, maka hal yang lain yang penting untuk menjalankan kepemimpinannya adalah faktor

kemampuan, pemimpin karena bagaimana pun baiknya sifat pemimpin, tetapi juga kemampuan yang ada pada dirinya kurang. maka sulit akan berhasil di dalam menjalankan kepemimpinannya.

Menurut WA. Gerungan dalam Onong U. Effendi (2000: 22) menyebutkan kemampuan yang harus dimiliki seorang pemimpin meliputi :

1. Penglihatan sosial, yaitu kemampuan dalam melihat dan memahami perasaan, sikap dan kebutuhan anggota lain dalam suatu kelompok.
2. Kemampuan berfikir abstrak, yaitu mempunyai kecerdasan yang tinggi.
3. Keseimbangan sosial, yaitu pada diri seorang pemimpin harus terdapat suatu kematangan emosional yang berdasarkan kesadaran yang mendalam akan membutuhkan keinginan, cita-cita dan dalam, perasaan serta pengintegrasian yang semuanya itu dalam suatu kepribadian yang harmonis.

Apabila seorang pemimpin dalam menjalankan roda manajemen suatu instansi menerapkan suatu gaya kepemimpinan yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan yang dipimpin tentu hal ini membawa dampak yang negatif bagi instansi tersebut antara lain dalam bentuk kekacauan yang terjadi dalam siklus kerja, para bawahan kurang mau mengerahkan seluruh kemampuan terbaik yang mereka miliki untuk mencapai hasil optimal bagi instansi yang bersangkutan, banyaknya tindakan indisipliner yang dilakukan oleh yang dipimpin yang akan merugikan pihak instansi.

Sedangkan menurut AW. Wijaya (2001: 31): "Kepemimpinannya berperan sebagai penggerak segala sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang

ada dalam organisasi; keberhasilan organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan akan sangat bergantung kepada berperannya pemimpin.

Lebih lanjut Soehardjono (1998: 25) menekankan bahwa untuk dapat menelaah dan mempelajari mengenai kepemimpinan haruslah bertitik tolak pada 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Pemimpin, yaitu seseorang yang menjalankan fungsi kepemimpinan (leadership).
2. Pengikut, yaitu sekelompok orang yang berkedudukan untuk mengikuti atau berfungsi kepengikutan atau yang biasa disebut followership
3. Situasi dan kondisi, yaitu kondisi yang melingkupi dan mengelilingi kepemimpinan atau kepengikutan tersebut.

Maka mengacu kepada pendapat di atas, jelaslah bahwa tugas seorang pemimpin sangat berat, karena ia harus dapat menggerakkan orang lain dan memainkan perannya agar ia benar-benar mendapat tempat di tengah-tengah para pengikutnya. Karena itu seorang pemimpin yang menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya harus dapat mensesuaikan ketiga unsur-unsur diatas.

II.B. Hipotesa

Berdasarkan perumusan masalah serta teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis mencoba membuat hipotesa sebagai berikut : “Diduga efektivitas pelaksanaan tugas bidang pemerintahan yang terdiri dari kuantitas kerja, waktu yang digunakan dan jabatan yang dipegang pada Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dinilai kurang maksimal.

B.C. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan bagaimana suatu variabel diukur, kemudian juga berfungsi untuk keseragaman pengertian dalam pengolahan dan analisa data. Untuk itu dalam tulisan ini akan diturunkan beberapa konsep operasional yang dinilai dapat memberikan arahan di dalam penyusunan penulisan ini.

1. Efektivitas tugas adalah realisasi suatu kegiatan yang dilakukan dan dikerjakan secara efektif.

Indikator efektifitas kerja menurut Moch As'ad (1999: 25) adalah :

- a. Kuantitas kerja pegawai merupakan jumlah atau banyaknya pegawai yang bekerja dan kejelasan tugas masing-masing bagian. Dimana jumlah satuan pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh setiap karyawan, baik secara mandiri maupun kelompok untuk mencapai target yang ditetapkan. Indikator kuantitas ini meliputi:
 1. Mencapai target yang telah ditetapkan.
 2. Memenuhi standar dan kualitas yang telah ditetapkan.
 3. Terjadi pemanfaatan sumberdaya secara baik dan optimal.
- b. Waktu yang digunakan merupakan lamanya suatu tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai, maksudnya waktu yang dipakai oleh pegawai dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya dalam mencapai target yang telah ditetapkan oleh organisasi. Indikator dari waktu ini meliputi:

1. Ketaatan terhadap waktu masuk kerja.
 2. Menatuhi waktu pelaksanaan kerja.
 3. Kemampuan menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditetapkan.
- c. Jabatan yang dipegang merupakan wewenang dan tugas masing-masing bagian, Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang karyawan dalam rangka susunan satuan organisasi yang dibebankan oleh seorang pejabat yang bersangkutan kepada seseorang baik untuk waktu yang penuh maupun sebagian.
- Indikator dari jabatan ini meliputi:
1. Pertanggung jawaban tugas.
 2. Kedudukan yang menunjukan tugas.
 3. Pelaksanaan wewenang oleh yang bersangkutan.
2. Kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan birokrasi pemerintah yang berada setingkat lebih tinggi dari desa atau kelurahan.
 3. Pemerintahan adalah urusan atau perbuatan untuk memerintah suatu negara atau daerah.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

III.A. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini berlokasi di Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

III.B. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dan sampel dari penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sementara masyarakat yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang akan dijadikan sampel penelitian ini cukup banyak maka teknik pengumpulan sampel ini menggunakan rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{114700}{1 + 114700(0.1)^2}$$

$$n = \frac{114700}{1118}$$

$n = 99.9$ dibulatkan menjadi 100

III.C. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer, yaitu :

Jenis data ini diperoleh secara langsung dari responden yang terpilih sebagai sampel penelitian, antara lain mencakup tentang pelaksanaan tugas pemerintahan serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas tersebut di kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder, yaitu:

Data yang dikumpulkan dari kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang meliputi: jumlah penduduk, agama, mata pencaharian, keadaan geografis, keadaan demokratis, sarana dan prasarana yang dimiliki, struktur pemerintahan, jumlah pegawai, tingkat pendidikan.

III.D. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan langsung ke pegawai negeri sipil di bagian pemerintahan kantor kecamatan Tampan kota Pekanbaru. Data yang ingin didapatkan yaitu mengenai aktifitas pegawai.

b. Wawancara

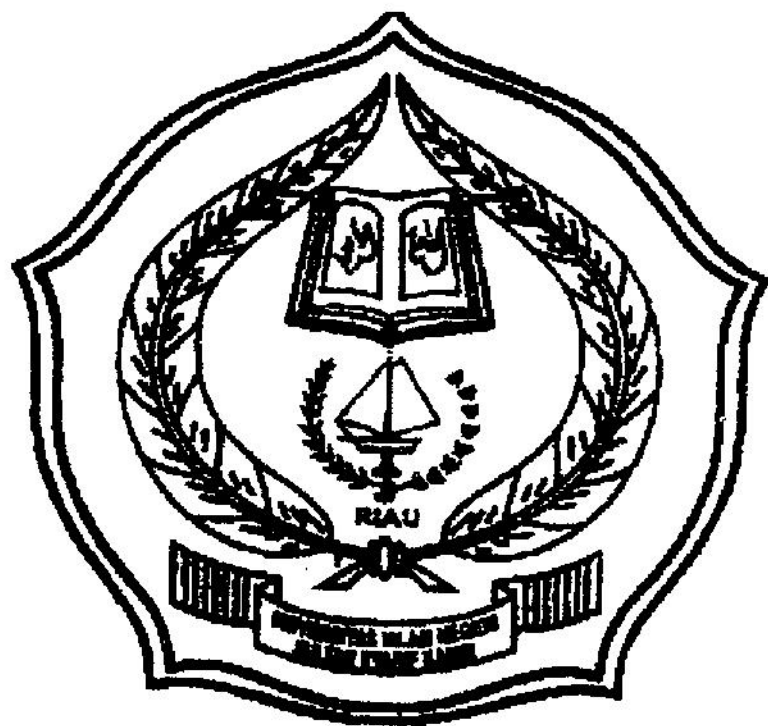
Melakukan tanya jawab kepada responden untuk memperoleh informasi mengenai segala sesuatu yang menyangkut masalah yang diteliti.

c. Kuesioner

Dengan menyediakan daftar pertanyaan yang akan penulis ajukan pada responden, yaitu warga masyarakat di Wilayah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang penulis jadikan sampel.

III.E. Analisa Data

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif yang membandingkan data yang ada dengan berbagai teori yang mendukung dan bersifat menjelaskan atau menguraikan. Selanjutnya penulis mengambil beberapa kesimpulan dari penjelasan-penjelasan tersebut.



BAB IV
GAMBARAN UMUM KECAMATAN TAMPAN
KOTA PEKANBARU

IV.A. Keadaan Geografis Wilayah

Kecamatan Tampang merupakan salah satu kecamatan yang berada di kota Pekanbaru yang dibentuk berdasarkan Perda kota Pekanbaru No.03 tahun 2003 dengan luas wilayah 54.714 KM². Wilayah kecamatan Tampang mempunyai keadaan tanah dataran dan rawa-rawa, jenis tanahnya adalah agromosol. Kecamatan ini terdiri dari 4 (empat) kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Simpang Baru
2. Kelurahan Sidomulyo Barat
3. Kelurahan Tuah Karya
4. Kelurahan Delima

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.1. Data monografi kecamatan Tampang

No	Kelurahan	Luas wilayah (KM ²)	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah KK
1	Simpang Baru	23.788	16	67	4.280
2	Sidomulyo Barat	13.796	16	91	8.097
3	Tuah Karya	1.805	9	71	9.526
4	Delima	15.325	12	66	7.346
	Jumlah	54.714	53	295	29.294

Sumber: kantor camat Tampang, 2010

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari empat kelurahan di kecamatan Tampan wilayah terluas adalah kelurahan Simpang Baru dengan luas wilayah 23.788 KM2 dan luas wilayah terkecil yaitu kelurahan Tuah Karya dengan luas wilayahnya 1.805 KM2.

1. Penduduk

Penduduk kecamatan Tampan berdasarkan hasil pendaftaran pemilik dan pendataan penduduk tahun 2010 adalah berjumlah 114.700 jiwa, yang terdiri dari 55.619 jiwa penduduk laki-laki dan 59.081 jiwa penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.2. Jumlah penduduk per kelurahan berdasarkan jenis kelamin di kecamatan Tampan.

No	Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Simpang Baru	9.270	8.950	18.220
2	Sidomulyo Barat	15.013	18.026	33.039
3	Tuah Karya	18.891	19.613	38.383
4	Delima	12.445	12.613	25.058
	Jumlah	55.619	59.081	114.700

Sumber: kantor camat Tampan, 2010.

Dari tabel diatas dapat diketahui dengan jelas jumlah penduduk di kecamatan Tampan, dimana jumlah penduduk yang dominan adalah perempuan dengan jumlah 59.081 jiwa, sedangkan penduduk laki-laki berjumlah 55.619 jiwa. Dari keempat kelurahan tersebut jumlah penduduk terbanyak adalah di kelurahan Tuah Karya yaitu sebanyak 38.383 jiwa.

Selanjutnya mengenai data penduduk menurut agama di kecamatan Tampan ini dapat diketahui pada tabel berikut ini:

Tabel IV.3. Jumlah penduduk menurut agama di kecamatan Tampan

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk Menurut Agama					Jumlah Penduduk
		Islam	Khatolik	Protestan	Hindu	Budha	
1	Simpang Baru	17.065	444	600	26	85	18.220
2	Sidomulyo Barat	30.481	892	1.485	34	147	33.039
3	Tuah Karya	37.457	192	704	6	24	38.383
4	Delima	19.593	2.755	2.323	0	387	25.058
	Jumlah	104.596	4.283	5.112	66	643	114.700

Sumber: kantor camat Tampan, 2010.

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah penduduk berdasarkan agama dikecamatan Tampan. jumlah penduduk terbanyak adalah penganut agama islam yakni sebanyak 104.596 jiwa dan kelurahan yang paling banyak menganut agama islam adalah kelurahan Buah Karya dengan jumlah 37.457 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk penganut agama yang paling sedikit adalah agama hindu dengan jumlah 66 jiwa.

2. Sarana Pendidikan

Tabel IV.4. Jumlah sarana pendidikan di kecamatan Tampan

No	Kelurahan	TK		SD		SLTP		SLTA	
		negri	swst	Negr i	swst	negri	swst	negri	swst
1	Sumpang baru	0	7	3	2	1	0	1	3
2	Sidomulyo barat	1	8	3	2	0	1	1	1
3	Tuah karya	0	11	6	3	0	3	0	1
4	Delima	0	10	3	5	1	2	0	3
	Jumlah	1	36	15	12	2	6	2	8

Sumber: kantor camat Tampan, 2010.

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah sarana pendidikan yang ada di kecamatan Tampan kota pekanbaru. Jumlah sarana pendidikan yang banyak adalah pada tingkat TK dengan jumlah 37 gedung, 1 negeri dan 36 swasta. Selanjutnya sarana pendidikan SD ada 27 gedung, tingkat SLTP 8 gedung dan pada tingkat SLTA 10 gedung.

3. Sarana Kesehatan

Tabel IV.5. Sarana kesehatan di kecamatan Tampan

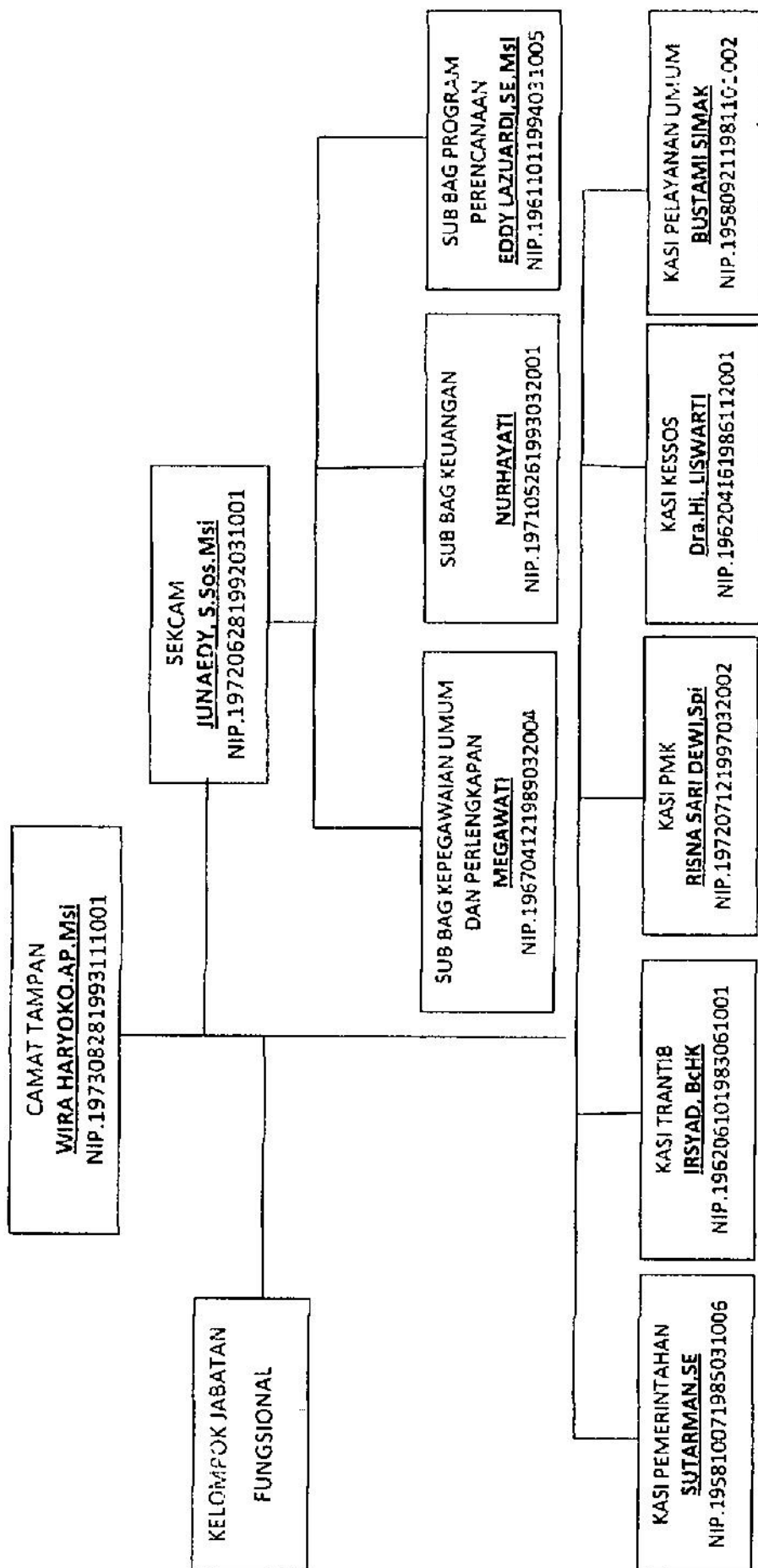
No	Kelurahan	Sarana kesehatan					
		Polik linik	Puske smas	Pusk. Pembnt	RS Bersalin	Praktik Dokter	Pos KB
1	Simpang baru	5	1	1	3	5	14
2	Sidomulyo barat	7	0	0	2	6	17
3	Tuah karya	6	0	0	3	3	13
4	Delima	9	2	1	2	3	14
Jumlah		27	3	2	10	14	58

Sumber: kantor camat Tampan, 2010.

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah sarana kesehatan di kecamatan tampan yan terdiri dari 27 poliklinik, 3 puskesmas, 2 puskesmas pembantu, 10 rumah sakit bersalin, 14 tempat praktik dokter dan 58 pos KB.

IV.B. Struktur Organisasi

**STUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU**



Sumber: kantor Camat Tampan, 2010.

Uraian Tugas Kerja Kecamatan Tampan

1. Camat :

Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan

2. Sekretaris Camat :

- a. Perencanaan dan pengendalian serta evaluasi terib administrasi perkantoran
- b. Melaksanakan urusan administrasi keuangan
- c. Pengendalian surat-surat dan nota dinas
- d. Pengendalian urusan perlengkapan
- e. Pengendalian urusan rumah tangga
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan camat

3. Kasi Pemerintahan :

- a. Merencanakan pengembangan dan melaksanakan urusan otonomi daerah
- b. Melaksanakan tugas pemerintahan umum
- c. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan pemerintahi kelurahan
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan dan capil
- e. Melaksanakan administrasi monografi dan peta wilayah kecamatan dan kelurahan
- f. Melaksanakan pembinaan sosial politik
- g. Melaksanakan tertib administrasi pertanahan

- h. Mengerjakan buku harian camat
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan camat
4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban :
- a. Merencanakan pengembangan dan melaksanakan pembinaan-pembinaan ketentraman dan ketertiban umum
 - b. Melaksanakan tugas-tugas polisi pamong praja
 - c. Penertiban dan penyusunan izin tempat-tempat usaha/ domosili
 - d. Penertiban dan penegakkan PERDA/kepala wilayah
 - e. Melakukan pendataan dan penertiban usaha-usaha perdagangan dan industri
 - f. Melakukan operasi K3
 - g. Pembinaan kerukunan hidup masyarakat
 - h. Pembinaan tempat-tempat pariwisata
5. Kasi Pembangunan Masyarakat Kelurahan :
- a. Merencanakan pembinaan pembangunan baik fisik maupun nonfisik
 - b. Pembinaan produksi dan distribusi usaha-usaha masyarakat
 - c. Merencanakan dan melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup
 - d. Pembinaan perekonomian rakyat
 - e. Pembinaan sosial politik
 - f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan umum
 - g. Penertiban dan mengurus izin mendirikan bangunan
 - h. Merencanakan dan melaksanakan UDKP

- i. Membina dan memotivasi fasilitasi masyarakat dalam pembangunan dan K3
 - j. Melaksanakan penomoran rumah dan bangunan
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan camat
 - l. Pembinaan industri, perdagangan dan penanaman modal
 - m. Melaksanakan tugas-tugas bidang perhubungan
 - n. FK-LPM dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)
6. Kasi Kesejahteraan Sosial :
- a. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan bidang-bidang sosial, kependudukan, peranan wanita dan olah raga
 - b. Melakukan pembinaan kehidupan beragama
 - c. Melaksanakan penyusunan program dan pembinaan bidang pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat
 - d. Membina organisasi-organisasi kepemudaan dan wanita
 - e. Melaksanakan pembinaan pemberdayaan wanita
 - f. Membina Dharma Wanita, PKK, dan majelis taklim
 - g. Merencanakan dan melakukan pembinaan koperasi
 - h. Melaksanakan urusan ketenagakerjaan
 - i. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan KB
 - j. Melaksanakan urusan penanggulangan anak nakal, korban narkoba, WTS, waria dan gelandangan
 - k. Urusan bencana alam
 - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan camat

7. Kasi Pelayanan Umum :

- a. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan umum baik intern maupun ekstern
- b. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan bidang kekayaan dan inventarisasi
- c. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan bidang K3 serta sarana dan prasarana umum
- d. Melaksanakn pelayanan bidang kepegawaian
- e. Pelayanan pajak bumi dan bangunan
- f. Pelayanan pendapatan daerah
- g. Pelayanan bidang penerangan
- h. Pelayanan kebersihan kantor
- i. Pelayanan dan persiapan apel/upacara
- j. Pelayanan ketatausahaan kantor dan arsip
- k. Pelayanan tamu-tamu kecamatan
- l. Tugas-tugas lain yag diberikan emat



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

V.A. Gambaran Umum Responden

Sebelum membahas tentang bagaimana tanggapan responden mengenai efektifitas tugas bidang pemerintahan pada kantor Kecamatan Tampan kota Pekanbaru berikut ini diuraikan tentang karakteristik responden yang terdiri dari jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan pekerjaan.

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah masyarakat Kecamatan Tampan kota Pekanbaru yang ditetapkan sebanyak 100 orang, berikut diuraikan tentang karakteristik responden.

1. Responden menurut jenis kelamin

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai identitas responden berikut ini penulis akan menguraikan mengenai identitas responden menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.1. Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin

Indikator	Responden	Persentase
Jenis kelamin :		
- Pria	63 orang	63%
- Wanita	37 orang	37%
Jumlah	100 orang	100%

Sumber : Data hasil olahan penelitian kecamatan Tampan 2010.

Berdasarkan pada tabel V.1 diatas maka dapat diketahui bahwa dari jumlah sampel 100 orang, responden laki-laki 63 orang atau 60% dan perempuan

37 orang atau 37%. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah laki-laki lebih dominan dari perempuan.

2. Responden Menurut Tingkat Usia

Untuk mengetahui identitas responden dari tingkat usia dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.2. Jumlah responden berdasarkan tingkat usia

No	Tingkat usia	Responden	Persentase
1.	20-30 tahun	42 orang	42%
2.	31-40 tahun	36 orang	36%
3.	41-50 tahun	18 orang	18%
4.	51 tahun keatas	4 orang	4%
Jumlah		100 orang	100%

Sumber : Data hasil olahan penelitian kecamatan Tampan 2010.

Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden terbanyak adalah berusia 20-31 tahun dengan jumlah 42 orang atau 42%, kemudian usia 31-40 tahun 36 orang atau 36% dan responden yang sedikit adalah usia 50 tahun keatas yaitu berjumlah 4 orang dari 100 responden atau 4%.

3. Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan diri, untuk mengetahui identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.3. Jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Responden	Persentase
1.	SD	14 orang	14%
2.	SLTP	32 orang	32%
3.	SLTA	43 orang	43%

4.	S1	11 orang	11%
Jumlah		100 orang	100%

Sumber : Data hasil olahan penelitian kecamatan Tampar 2010.

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa sebanyak 100 orang responden dalam penelitian dilihat dari pendidikannya 14 orang atau 14% berpendidikan SD dan 32 orang atau 32% dari tingkat SLTP, sedangkan dari tingkat SLTA berjumlah 43 orang atau 43% dan yang berpendidikan S1 berjumlah 11 orang atau 11% dari 100 responden. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang mendominasi berpendidikan SLTA sedangkan yang sedikit yaitu dari responden berpendidikan S1.

4. Responden Menurut Jenis Pekerjaan

Selanjutnya untuk mengetahui jumlah responden menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.4. Jumlah responden berdasarkan jenis pekerjaan

No	Jenis pekerjaan	Responden	Persentase
1.	Wiraswasta	43 orang	43%
2.	Buruh	18 orang	18%
3.	PNS	4 orang	4%
4.	Mahasiswa	11 orang	11%
5.	IRT	24 orang	24%
Jumlah		100 orang	100%

Sumber : Data hasil olahan penelitian kecamatan Tampar 2010.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa secara mayoritas responden memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta yang berjumlah 43 orang atau 43% kemudian responden yang memiliki pekerjaan sebagai IRT berjumlah 24 orang atau 24% , responden yang memiliki pekerjaan sebagai buruh sebanyak 18 orang atau 18%, mahasiswa berjumlah 11 orang atau 11% dan responden yang sedikit

adalah yang bekerja sebagai PNS yaitu berjumlah 4 orang atau 4% dari keseluruhan responden. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang dominan pekerjaannya adalah sebagai wiraswasta dan responden yang paling sedikit adalah bekerja sebagai PNS.

V.B. Efektifitas Tugas Bidang Pemerintahan Pada Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Untuk mengetahui gambaran mengenai efektifitas tugas bidang pemerintahan pada kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Kuantitas kerja

Merupakan jumlah atau banyaknya pegawai yang bekerja dan kejelasan tugas masing-masing bagian, dimana jumlah satuan pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh setiap karyawan, baik secara mandiri maupun kelompok untuk mencapai target yang ditetapkan. Jumlah pegawai pada kantor Kecamatan Tampan dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Jabatan	Jumlah
1	Camat	1
2	Sekretaris Camat	1
3	Seksi Pemerintahan	1
4	Seksi Ketentraman dan ketertiban	1
5	Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan	1
6	Seksi Kesejahteraan Sosial	1

7	Seksi Pelayanan Umum	1
8	Kasub Program	1
9	Kasub Kepegum dan Perlengkapan	1
10	Kasub Keuangan	1
11	Pegawai	10
	Jumlah	20

Sumber: *Kantor Kecamatan Tampar, 2010*

Jumlah pegawai pada kantor Kecamatan Tampar cukup memadai yakni 20 orang pegawai, sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan juga memadai, namun jika dilihat dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan belum maksimal dalam pelaksanaannya.

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar setiap masyarakat atas layanan administrasi, barang dan jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak boleh atau dapat disediakan oleh pasar atau mekanisme jual beli pada umumnya. Sebagai abdi negara sudah semestinya aparatur pemerintahan memberikan pelayanan yang memuaskan dengan mempermudah pelayanan kepada masyarakat karena penyelenggara pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah daerah dalam berbagai sektor pelayanan kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Untuk melihat tanggapan dari responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.5. Tanggapan responden tentang apakah pelaksanaan tugas bidang Pemerintahan pada kantor kecamatan tampan telah memenuhi standar dan kualitas yang telah ditetapkan

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat memenuhi	2	2%
2.	Memenuhi	53	53%
3.	Cukup memenuhi	41	41%
4.	Tidak memenuhi	4	4%
5.	Sangat tidak memenuhi	0	0%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data hasil olahan penelitian kecamatan Tampan 2010.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab memenuhi sebanyak 53 orang atau 53 % kemudian yang menjawab cukup memenuhi sebanyak 41 orang atau 41% sedangkan 4 orang atau 4% menjawab tidak memenuhi dan yang sedikit menjawab mengatakan sangat memenuhi sebanyak 2 orang atau 2% dari 100 responden. Jadi disini berarti menurut masyarakat pelaksanaan tugas bidang pemerintahan telah memenuhi standar dan kualitas yang telah ditetapkan, terbukti responden paling banyak menjawab memenuhi yaitu 53 orang atau 53% dari 100 responden.

Selanjutnya tanggapan responden tentang apakah tugas bidang pemerintahan pada kantor kecamatan Tampan telah sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki pegawai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.6. Tanggapan responden tentang apakah tugas bidang pemerintahan pada kantor Kecamatan Tampan telah sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki pegawai

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat sesuai	0	0%
2.	Sesuai	26	26%
3.	Cukup sesuai	68	68%
4.	Tidak sesuai	6	6%
5.	Sangat tidak sesuai	0	0%

Jumlah	100	100%
--------	-----	------

Sumber : Data hasil olahan penelitian kecamatan Tampan 2010.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang menjawab menjawab sesuai sebanyak 26 orang atau 26% sedangkan yang menjawab cukup sesuai 68 orang atau 68%, yang menjawab tidak sesuai sebanyak 6 orang atau 6% kemudian tidak ada responden yang menjawab sangat sesuai dan sangat tidak sesuai dari 100 responden. Jadi kesimpulannya dari jawaban responden bahwa tugas bidang pemerintahan pada kantor kecamatan tampan cukup sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki pegawai, terbukti yang yang menjawab cukup sesuai mendominasi.

Selanjutnya tanggapan responden tentang kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugas bidang pemerintahan pada kantor Kecamatan Tampan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.7. Kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugas bidang pemerintahan pada kantor Kecamatan Tampan

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	2	2%
2.	Baik	60	60%
3.	Cukup baik	38	38%
4.	Tidak baik	0	0%
5.	Sangat tidak baik	0	0%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data hasil olahan penelitian kecamatan Tampan 2010.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa paling banyak responden menjawab baik yaitu 60 orang atau 60% kemudian 38 orang atau 38% yang menjawab cukup baik dan yang paling sedikit 2 orang atau 2% menjawab sangat baik, tidak ada responden yang menjawab kinerja pegawai tidak baik dan sangat tidak baik dari 100 responden. Jadi kesimpulannya disini responden menilai kinerja pegawai

bidang pemerintahan pada kantor kecamatan Tampan baik terbukti responden dominan menjawab baik sebanyak 60 orang atau 60%.

Kemudian tanggapan responden tentang apakah pelaksanaan tugas bidang pemerintahan yang dilaksanakan telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.8. Tanggapan responden tentang apakah pelaksanaan tugas bidang pemerintahan yang dilaksanakan telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat sesuai	3	3%
2.	Sesuai	64	64%
3.	Cukup sesuai	24	24%
4.	Tidak sesuai	9	9%
5.	Sangat tidak sesuai	0	0%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data hasil olahan penelitian kecamatan Tampan 2010.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang menjawab sangat sesuai sebanyak 3 orang atau 3% kemudian 64 orang atau 64% menjawab sesuai sedangkan yang menjawab cukup sesuai sebanyak 24 orang atau 24% dan 9 orang atau 9% yang menjawab tidak sesuai, tidak ada responden yang menjawab sangat tidak sesuai dari 100 orang responden. Jadi paling banyak responden menjawab sesuai, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas bidang pemerintahan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya tanggapan responden tentang Sumber daya yang dimiliki oleh pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang pemerintahan pada kantor Kecamatan Tampan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.9. Sumber daya yang dimiliki oleh pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang pemerintahan pada kantor Kecamatan Tampan

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	0	0%
2.	Baik	56	56%
3.	Cukup baik	40	40%
4.	Tidak baik	4	4%
5.	Sangat tidak baik	0	0%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data hasil olahan penelitian kecamatan Tampan 2010.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang menjawab baik sebanyak 56 orang atau 56% kemudian 40 orang atau 40% yang menjawab cukup baik, sedangkan yang menjawab paling sedikit yaitu tidak baik sebanyak 4 orang atau 4% dari 100 responden dan tidak ada yang menjawab sangat baik juga sangat tidak baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang pemerintahan pada kantor Kecamatan Tampan adalah baik.

b. Waktu yang digunakan

Merupakan lamanya suatu tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai, maksudnya waktu yang dipakai oleh pegawai dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya dalam mencapai target yang telah ditetapkan oleh organisasi. Berdasarkan pengamatan dilokasi penelitian pegawai pemerintahan belum maksimal dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditentukan terutama terhadap waktu atau pelaksanaan jam kerja (dari 07.30 – 16.00). Para pegawai pemerintahan terkadang tidak berada ditempat pada saat pelaksanaan jam kerja sehingga masyarakat yang akan melakukan urusan memerlukan waktu agak lama dan menunda urusannya. Ini berarti pegawai

pemerintahan dalam bekerja belum sesuai dengan waktu jam kerja yang telah ditentukan atau belum memanfaatkan waktu semaksimal mungkin dalam bekerja.

Berikut adalah pelaksanaan pelayanan tugas pemerintahan kecamatan Tampan kota Pekanbaru:

Jenis pelayanan	Standar waktu penyelesaian (hari)	Rata-rata waktu penyelesaian (hari)	Selisih
SKB	2	6	4
Legalisir	1	2	1
SITU	3	5	2
IMB	2	5	3

Sumber: Kantor Kecamatan Tampan, 2010

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai untuk melayani masyarakat belum berjalan dengan baik karena tidak sesuai dengan standar waktu pembuatan yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan pengamatan beberapa orang pegawai sering tidak berada ditempat pada saat jam kerja sehingga masyarakat yang berurusan di kantor Camat harus menunggu untuk melakukan urusan yang dibutuhkan dan pemborosan waktu dalam pengurusan. Adapun tanggapan responden tentang waktu yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.10. Tanggapan responden tentang apakah penyelesaian tugas bidang pemerintahan pada kantor kecamatan Tampan tepat pada waktunya

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat tepat	0	0%
2.	Tepat	20	20%
3.	Cukup tepat	62	62%
4.	Tidak tepat	16	16%
5.	Sangat tidak tepat	2	2%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data hasil olahan penelitian kecamatan Tampan 2010.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang menjawab tepat sebanyak 20 orang atau 20%, kemudian 62 orang atau 62% menjawab cukup tepat selanjutnya yang menjawab tidak tepat berjumlah 16 orang atau 16% dan 2 orang atau 2% dari 100 responden menjawab sangat tidak tepat, tidak ada yang menjawab sangat tepat terhadap penyelesaian tugas bidang pemerintahan. Dari pendapat responden paling banyak menjawab cukup tepat waktu terhadap penyelesaian tugas bidang pemerintahan dan paling sedikit menjawab sangat tidak tepat, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian tugas bidang pemerintahan pada kantor kecamatan Tampan cukup tepat waktu.

Selanjutnya yaitu tanggapan responden mengenai aktifitas pegawai dalam bekerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.11. Tanggapan responden tentang apakah aktifitas pegawai dalam bekerja telah sesuai dengan pelaksanaan waktu jam kerja yang telah ditentukan sebelumnya

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat sesuai	2	2%
2.	Sesuai	24	24%
3.	Cukup sesuai	65	65%
4.	Tidak sesuai	8	8%
5.	Sangat tidak sesuai	1	1%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data hasil olahan penelitian kecamatan Tampan 2010.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang menjawab sangat sesuai sebanyak 2 orang atau 2%, yang menjawab sesuai 24 orang atau 24% kemudian 65 orang atau 65% yang menjawab cukup sesuai selanjutnya 8 orang atau 8% menjawab tidak sesuai dan yang menjawab sangat tidak sesuai 1 orang atau 1%. Dari pendapat responden paling banyak menjawab cukup sesuai yaitu 65

orang atau 65%, jadi dapat disimpulkan bahwa aktifitas pegawai dalam bekerja cukup sesuai dengan pelaksanaan waktu jam kerja yang telah ditentukan sebelumnya.

Kemudian tanggapan responden mengenai para pegawai pemerintahan telah memanfaatkan waktu semaksimal mungkin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.12. Tanggapan responden tentang apakah para pegawai pemerintahan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin dalam bekerja

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat maksimal	0	0%
2.	Maksimal	22	22%
3.	Cukup maksimal	38	38%
4.	Tidak maksimal	40	40%
5.	Sangat tidak maksimal	0	0%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data hasil olahan penelitian kecamatan Tampar 2010.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab maksimal sebanyak 22 orang atau 22% selanjutnya 38 orang atau 38% menjawab cukup maksimal kemudian sebanyak 40 orang atau 40% yang menjawab tidak maksimal mengenai pemanfaatan waktu dalam bekerja dari 100 orang responden dan tidak ada yang menjawab sangat tidak maksimal. Dari tanggapan responden paling banyak menjawab tidak maksimal, jadi dapat disimpulkan bahwa para pegawai pemerintahan tidak maksimal memanfaatkan waktu dalam bekerja.

Selanjutnya tanggapan responden mengenai kepatuhan terhadap waktu masuk jam kerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.13. Tanggapan responden tentang apakah para pegawai pemerintahan mematuhi terhadap waktu masuk jam kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat mematuhi	0	0%
2.	Mematuhi	22	22%
3.	Cukup mematuhi	32	32%
4.	Tidak mematuhi	34	34%
5.	Sangat tidak mematuhi	12	12%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data hasil olahan penelitian kecamatan Tampan 2010.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab mematuhi sebanyak 22 orang atau 22%, kemudian yang menjawab cukup mematuhi yaitu 32 orang atau 32%, selanjutnya 34 orang atau 34% menjawab tidak mematuhi dan 12 orang atau 12% dari 100 responden menjawab sangat tidak mematuhi terhadap waktu masuk jam kerja yang telah ditentukan. Dari tanggapan responden tersebut paling banyak menjawab tidak mematuhi yaitu sebanyak 34 orang atau 34%, jadi dapat disimpulkan bahwa para pegawai pemerintahan tidak mematuhi terhadap waktu masuk jam kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya tanggapan responden tentang apakah pegawai selalu berada ditempat pada saat jam kerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.14. Tanggapan responden tentang apakah pegawai pemerintahan pada kantor Kecamatan Tampan selalu berada ditempat pada saat jam kerja

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat setuju	6	6%
2.	Setuju	17	17%
3.	Cukup setuju	26	26%
4.	Tidak setuju	41	41%
5.	Sangat tidak setuju	10	10%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data hasil olahan penelitian kecamatan Tampan 2010.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 100 orang responden yang menjawab sangat setuju bahwa pegawai pemerintahan selalu berada ditempat pada saat jam kerja sebanyak 6 orang atau 6%, selanjutnya yang menjawabsetuju sebanyak 17 orang atau 17%, kemudian 26 orang atau 26% yang menjawab cukup setuju, 41 orang atau 41% menjawab tidak setuju dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 10 orang atau 10% dari 100 responden. Dari tanggapan responden tersebut paling banyak menjawab tidak setuju, jadi dapat disimpulkan bahwa pegawai pemerintahan pada kantor Kecamatan Tampan tidak selalu berada ditempat pada saat jam kerja.

c. Jabatan yang dipegang

Merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang karyawan dalam rangka susunan satuan organisasi yang dibebankan oleh seorang pejabat yang bersangkutan kepada seseorang baik untuk waktu yang penuh maupun sebagian. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab pegawai pemerintahan pada kantor kecamatan Tampan:

1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan.
 - f. membina penyelenggaraan kelurahan.
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan Kelurahan.
3. Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Jika dilihat para pegawai belum mempertanggungjawabkan secara penuh terhadap jabatan dan tugas yang dibebankan kepada pegawai yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya. Realisasi tugas yang diamanahkan kepada pegawai pemerintahan belum berjalan maksimal sesuai dengan prosedur. Untuk melihat tanggapan responden terhadap jabatan yang dipegang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.15. Tanggapan responden tentang apakah jabatan yang dipegang yang menjadi wewenang dan tugas masing-masing bagian sudah terlaksana dengan semestinya

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat terlaksana	1	1%
2.	Terlaksana	57	57%
3.	Cukup terlaksana	40	40%
4.	Tidak terlaksana	2	2%
5.	Sangat tidak terlaksana	0	0%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data-hasil olahan penelitian kecamatan Tampan 2010.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang menjawab sangat terlaksana berjumlah 1 orang atau 1%, kemudian 57 orang atau 57% menjawab

terlaksana, selanjutnya 40 orang atau 40% menjawab cukup terlaksana dan yang menjawab tidak terlaksana 2 orang atau 2% dari 100 responden mengenai wewenang dan tugas pegawai. Dari tanggapan responden tersebut paling banyak menjawab terlaksana yaitu 57 orang, dapat disimpulkan bahwa jabatan yang dipegang yang menjadi wewenang dan tugas masing-masing bagian sudah terlaksana dengan semestinya.

Selanjutnya tanggapan responden mengenai pertanggungjaawaban jabatan dan tugas pegawai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.16. Tanggapan responden tentang apakah para pegawai telah mempertanggungjawabkan secara penuh terhadap jabatan dan tugas yang dihebankan oleh pegawai yang bersangkutan

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat sesuai	2	2%
2.	Sesuai	25	37%
3.	Cukup sesuai	30	55%
4.	Tidak sesuai	43	6%
5.	Sangat tidak sesuai	0	0%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data hasil olahan penelitian kecamatan Tampan 2010.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang menjawab sangat sesuai sebanyak 2 orang atau 2%, kemudian 25 orang atau 25% menjawab sesuai, selanjutnya yang menjawab cukup sesuai sebanyak 30 orang atau 30% sedangkan yang menjawab tidak sesuai mengenai pertanggungjawaban jabatan dan tugas sebanyak 43 orang atau 43% dari 100 responden dan yang paling banyak adalah tidak sesuai. Jadi dapat disimpulkan bahwa para pegawai tidak mempertanggungjawabkan secara penuh terhadap jabatan dan tugas yang dihebankan oleh pegawai yang bersangkutan.

Selanjutnya tanggapan responden mengenai kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada masing-masing pegawai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.17. Tanggapan responden mengenai apakah kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada masing-masing pegawai sudah baik

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	3	3%
2.	Baik	42	42%
3.	Cukup baik	48	48%
4.	Tidak baik	7	7%
5.	Sangat tidak baik	0	0%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data hasil olahan penelitian kecamatan Tampan 2010.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab sangat baik sebanyak 3 orang atau 3% masyarakat menilai kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan sangat baik, kemudian yang menjawab baik sebanyak 42 orang atau 42%, sedangkan yang menjawab cukup baik sebanyak 48 orang atau 48% dan 7 orang atau 7% dari 100 responden menjawab tidak baik mengenai kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas. Dari tanggapan responden tersebut paling banyak menjawab cukup baik yaitu 48 orang atau 48%, jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada masing-masing pegawai cukup baik.

Selanjutnya tanggapan responden tentang apakah pegawai pemerintahan sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas yang diberikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.18. Tanggapan responden mengenai apakah pegawai pemerintahan sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas yang diberikan

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat sesuai	2	2%
2.	Sesuai	52	52%
3.	Cukup sesuai	46	46%
4.	Tidak sesuai	0	0%
5.	Sangat tidak sesuai	0	0%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data hasil olahan penelitian kecamatan Tampan 2010.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab sangat sesuai berjumlah 2 orang:atau 2%, kemudian yang menjawab sesuai sebanyak 52 orang atau 52%, selanjutnya 46 orang atau 46% dari 100 responden menjawab cukup sesuai bahwa pegawai pemerintahan sudah menjalankan tugas yang diberikan dan tidak ada yang menjawab tidak sesuai juga menjawab sangat tidak sesuai. Dari tanggapan responden paling banyak menjawab sesuai yaitu 52 orang dan paling sedikit menjawab sangat sesuai, jadi dapat disimpulkan bahwa pegawai pemerintahan dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan tugas yang diberikan.

Selanjutnya tanggapan responden tentang bagaimana realisasi tugas yang diamanahkan kepada para pegawai pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.19. Relisasi tugas yang diamanahkan kepada para pegawai pemerintahan pada kantor kecamatan Tampan

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	6	6%
2.	Baik	38	38%
3.	Cukup baik	44	44%
4.	Tidak baik	12	12%
5.	Sangat tidak baik	0	0%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data hasil olahan penelitian kecamatan Tampan 2010.

Dari tabel diatas dapat dilihat responden menjawab sebanyak 6 orang atau 6 % bahwa relisasi tugas yang diamanahkan kepada pegawai pemerintahan kecamatan Tampan sangat baik, selanjutnya yang menjawab baik sebanyak 38 orang atau 38% ,kemudian yang menjawab cukup baik sebanyak 44 orang atau 44%, sedangkan 12 orang atau 12% menjawab tidak baik dari 100 responden dan tidak ada yang menjawab sangat tidak baik. Dari tanggapan responden tersebut yang dominan menjawab cukup baik, jadi kesimpulannya adalah relisasi tugas yang diamanahkan kepada para pegawai pemerintahan pada kantor kecamatan tampan cukup baik.

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari tiga indikator yang digunakan untuk melihat dan menilai efektifitas tugas bidang pemerintahan pada kantor Kecamatan Tampan kota pekanbaru maka dapat dilihat rekapitulasi tanggapan responden dibawah ini :

Tabel V.20. Rekapitulasi tanggapan responden tentang efektifitas tugas bidang pemerintahan pada kantor kecamatan Tampan kota Pekanbaru

No	Indikator	Kategori Jawaban					Jumlah
		SB	B	CB	TB	STB	
I.	Kuantitas kerja						
	- Pelaksanaan tugas bidang pemerintahan memenuhi standar dan kualitas yang ditetapkan	2%	53%	41%	4%	0%	100%
	- Tugas bidang pemerintahan sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki pegawai	0%	26%	68%	6%	0%	100%
	- Kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugas bidang pemerintahan	2%	60%	38%	0%	0%	100%
	- Tanggapan responden tentang apakah tugas	3%	64%	24%	9%	0%	100%

2.	bidang pemerintahan sesuai dengan aturan yang ditetapkan						
	- Sumber daya yang dimiliki pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang pemerintahan	0%	56%	40%	4%	0%	100%
	Waktu yang digunakan						
	- Penyelesaian tugas bidang pemerintahan	0%	20%	62%	16%	2%	100%
	- Tanggapan responden tentang aktifitas pegawai dalam bekerja sesuai waktu jam kerja	2%	24%	65%	8%	1%	100%
	- Tanggapan responden tentang apakah pegawai memanfaatkan waktu semaksimal mungkin dalam bekerja	0%	22%	38%	40%	0%	100%
	- Tanggapan responden tentang apakah pegawai mematuhi waktu masuk jam kerja	0%	22%	32%	34%	12%	100%
	- Tanggapan responden tentang apakah pegawai berada ditempat pada saat	6%	17%	26%	41%	10%	100%
	Jabatan yang dipegang						
	- Jabatan yang dipegang yang menjadi wewenang dan tugas masing-masing	1%	57%	40%	2%	0%	100%
3.	- Pertanggungjawaban jabatan dan tugas pegawai	2%	25%	30%	43%	0%	100%
	- Kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan	3%	42%	48%	7%	0%	100%
	- Tanggapan responden tentang apakah pegawai sudah menjalankan tugas sesuai yang diberikan	2%	52%	46%	0%	0%	100%
	- Relisasi tugas yang diamanahkan kepada pegawai	6%	38%	44%	12%	0%	100%
	Jumlah	29%	578%	642%	226%	25%	100%
	Rata-rata	2%	38%	43%	15%	2%	100%

Sumber : Data hasil olahan penelitian kecamatan Tampan 2010.

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat hasil rata-rata dari keseluruhan tanggapan responden yang telah direkapitulasi mengenai efektivitas tugas bidang pemerintahan pada kantor Kecamatan Tampan kota Pekanbaru yaitu sebanyak 2% mengatakan sangat baik, selanjutnya dalam kategori baik adalah 38%, kemudian 43% mengatakan cukup baik, dan yang mengatakan tidak baik sebanyak 15%, sedangkan responden yang mengatakan sangat tidak baik sebanyak 2% dari 100%. Dari rekapitulasi tersebut paling banyak mengatakan cukup baik yaitu 43%.

Berdasarkan dari analisa yang telah dilakukan, maka hasil dari penelitian menunjukan bahwa efektivitas tugas bidang pemerintahan pada kantor kecamatan Tampan termasuk dalam kategori “cukup baik” yakni sebanyak 43%, berarti pegawai bidang pemerintahan belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Dalam sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa ditingkat pusat maupun daerah bahkan sampai pedesaan guna untuk mewujudkan masyarakat yang tentram dan sejahtera maka diperlukan aparatur pemerintah yang benar-benar dapat diandalkan dalam menjalankan tugas yang diemban khususnya pada bidang pemerintahan.

Pelaksanaan birokrasi pemerintah dan seiring perkembangan masyarakat yang kian meningkat, khususnya masyarakat di Kecamatan Tampan kota Pekanbaru telah bersentuhan dengan birokrasi dalam pengurusan izin yang dibutuhkan, seperti izin mendirikan bangunan, kartu tanda penduduk dan sebagainya. Sehingga pegawai pemerintahan harus mampu melaksanakan birokrasi sebagaimana yang telah menjadi tugas dan wewenangnya.

V.C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas Bidang Pemerintahan Pada Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Dilihat dari tanggapan responden mengenai efektifitas tugas bidang pemerintahan pada kantor Kecamatan Tampan kota Pekanbaru dapat dilihat adanya faktor yang menghambat pelaksanaan tugas pemerintahan diantaranya yaitu aparatur pemerintahan terkadang tidak berada ditempat pada saat pelaksanaan jam kerja sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Didalam pelaksanaan tugas-tugas bidang pemerintahan yang dilakukan, memang telah menetapkan prosedur dan tata kerja yang harus diberikan kepada masyarakat yang akan melakukan urusan pada kantor camat, namun kenyataannya masih dijumpai adanya aparatur pemerintahan yang kurang disiplin sehingga masyarakat yang melakukan urusan sering tertunda, akibatnya penyelesaian tugas bidang pemerintahan tidak tepat pada waktunya.

Kemudian di dalam melaksanakan kegiatannya para pegawai pemerintahan terkadang tidak mematuhi terhadap waktu masuk jam kerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga masyarakat yang akan berurusan di kantor camat memerlukan waktu yang agak lama untuk menyelesaikan urusannya, ini berarti pegawai belum disiplin dalam melaksanakan tugasnya. Dalam penyelenggaraan birokrasi, Kecamatan membutuhkan tenaga kerja atau pegawai yang berkualitas dan terampil karena efektif tidaknya suatu tugas yang dikerjakan tergantung pada kualitas sumber daya manusia dari pegawai itu sendiri. Kinerja yang dilakukan haruslah dengan karyawan yang terdidik, terlatih dan berpengalaman dibidangnya sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan



BAB VI

PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai efektivitas tugas bidang pemerintahan pada kantor Kecamatan Tampan kota Pekanbaru.

VI.A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai efektivitas tugas bidang pemerintahan pada kantor Kecamatan Tampan, maka penulis mengambil kesimpulan dari penelitian sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah masyarakat Kecamatan Tampan kota Pekanbaru yang ditetapkan sebanyak 100 orang.
2. Dalam sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna untuk mewujudkan masyarakat yang tentram dan sejahtera, maka diperlukan aparatur pemerintah yang benar-benar dapat diandalkan.
3. Tanggapan responden mengenai efektivitas tugas bidang pemerintahan pada kantor kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan indikator kuantitas kerja, waktu yang digunakan dan jabatan yang dipegang, berdasarkan dari hasil penelitian pada bab V halaman 57 masuk dalam kategori "cukup baik".
4. Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai efektivitas tugas bidang pemerintahan rata-rata mengatakan cukup baik sebanyak 43 orang atau 43% dari 100 responden.

VI.B. Saran

1. Dalam melaksanakan kegiatannya sebaiknya para karyawan berupaya dengan sekuat tenaga dan lebih giat bekerja untuk kuantitas kerja yang maksimal, artinya karyawan harus selalu menyiapkan kondisi tubuh yang kuat dan sehat, kondisi perasaan dan emosi yang penuh semangat, kondisi pikiran yang jernih, tenang dan kreatif sehingga organisasi akan menjadi semakin efektif dalam operasionalnya.
2. Untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang baik camat seharusnya berperan aktif dalam mengawasi bawahannya dan bertindak tegas terhadap pegawai yang melanggar waktu jam kerja dalam melaksanakan tugas dan menyelesaikan pekerjaannya dengan memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar peraturan.
3. Aparatur pemerintahan agar dapat melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan jabatan yang diberikan oleh yang bersangkutan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sebaiknya diberikan pelatihan dan pembinaan perilaku supaya terciptanya aparatur yang berkualitas.

- Soejadi, FX. 1997. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Socprihanto, John. 1998. *Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Pengembangan Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.
- Siagian, SP. 2001. *Pemimpin dan Perilaku*. Jakarta: Gunung Agung.
- Thoha, Ahmad. 2002. *Pemahaman Praktis Sumber Daya Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Wijaya, AW. 1999. *Administrasi dan Kepegawaian Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.